

**PIDATO KENEGARAAN**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**S O E H A R T O**

DI DEPAN SIDANG  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
16 AGUSTUS 1996

REPUBLIK INDONESIA



S O E H A R T O  
*Presiden Republik Indonesia*



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang  
saya hormati;

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Setiap kali kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan seperti yang Insya Allah akan kita lakukan besok, maka menurut agama yang kita yakini masing-masing kita memanjatkan seluruh rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Alinea ketiga Pembukaan UUD kita menyatakan, bahwa "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Kalimat itu mengungkapkan keyakinan bangsa kita yang terdalam, bahwa semata-mata atas berkat Tuhan Yang

Maha Esa lah, maka perjuangan panjang dan sangat berat dari generasi ke generasi bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan dan penindasan pada akhirnya melahirkan Indonesia Merdeka.

Pada saat kita memperingati 51 tahun Indonesia Merdeka, dengan keutuhan bangsa yang bertambah kukuh, dengan segala hasil pembangunan yang kita nikmati sebagai bangsa, maka rasa syukur yang tidak terhingga itulah yang kita tujukan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pemurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lebih-lebih, bila kita lihat ke berbagai penjuru dunia, dengan rasa prihatin kita menyaksikan banyak bangsa yang mengalami pertikaian dan perpecahan, yang belum berhasil menuntaskan integrasi nasionalnya, yang masih bergumul melawan kemelaratan dan kelaparan serta penyakit.

Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kita tujukan kepada para pahlawan bangsa dan kepada semua pendahulu kita yang telah berjuang dan berkorban demi martabat kita semua yang hidup hari ini sebagai warga yang terhormat dalam negara yang merdeka dan berdaulat.

Tahun peringatan 51 tahun Kemerdekaan kali ini bertepatan pula dengan 30 tahun usia Orde Baru, Orde Pembangunan.

Sebagai bangsa kita telah bersepakat bahwa Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang kita letakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD '45.

Pelaksanaan Pancasila dan UUD '45 itulah yang menjadi kekuatan utama terwujudnya stabilitas nasional yang dinamis dalam tiga dasawarsa terakhir ini, kurun waktu yang terpanjang dalam sejarah kita sejak kemerdekaan. Dan stabilitas nasional yang dinamis itulah yang memungkinkan kita membangun dengan hasil-hasil yang kita rasakan sampai hari ini.

Orde Baru lahir setelah ABRI bersama rakyat berhasil menumpas pemberontakan "Gerakan Tiga Puluh September" yang didalangi, dirancang dan dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka selama bertahun-tahun telah menyiapkan

diri untuk bangkit kembali setelah pemberontakan yang gagal pada tahun '48 terhadap Republik Indonesia. Padahal, bangsa Indonesia waktu itu sedang gigih-gigihnya berjuang melawan penjajahan yang akan memulihkan kekuasaannya di negeri ini. Perbuatan PKI jelas pengkhianatan terhadap bangsanya, terhadap kemerdekaan nasionalnya.

Dalam persiapan merebut kekuasaan, PKI secara terencana mematangkan "situasi revolusioner", menyusup ke sand kemari, menyebarkan fitnah dan desas-desus, mengadu domba, meruncing-runcingkan konflik dalam masyarakat dan mengatasnamakan keadilan demi rakyat.

Sebagian dari kita ada yang mengenal benar cara berpikir, strategi, siasat dan aksi-aksi PKI. Sebagian lagi dari masyarakat kita sama sekali tidak mengenal cara-cara PKI memaksakan kehendaknya dalam merebut kekuasaan negara, karena mereka lahir setelah tahun '65 atau pada tahun tersebut bare berumur beberapa tahun.

Bisa saja, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, cara berpikir dan cara bertindak PKI tampil dalam bentuk lain ditengah-tengah masyarakat kita dewasa ini.

Pemberontakan PKI pada akhir tahun '65 merupakan tragedi nasional dan meninggalkan luka-luka yang dalam dan lama pada tubuh bangsa kita. Itulah sebabnya, secara konstitusional PKI dengan ideologi yang mendukungnya kita larang buat selamanya di bumi Indonesia. Kita berketetapan hati agar pemberontakan PKI dan sejenisnya tidak akan berulang kembali di Tanah Air kita buat selamanya.

Pemberontakan PKI yang membawa malapetaka nasional membangkitkan kesadaran bangsa kita untuk merenungkan kembali . perjalanan sejarahnya di masa lampau.

Zaman "jor-joran revolusioner" yang memang didorong-dorong oleh PKI jelas membawa suasana saling curiga dan perpecahan, ketegangan dan ketidakstabilan, kemerosotan ekonomi dan menjauhkan rakyat dari kesejahteraan.

Sebelum itu kita pernah mengalami zaman liberalisme dengan sistem banyak partai, malahan sangat banyak partai. Dalam suasana sistem pemerintahan parlementer sangat sulit membentuk pemerintahan yang stabil, karena pemerintahan koalisi terlalu gampang digoyah-goyah dari dalam maupun dari luar pemerintahan. Kita pernah mengalami umur pemerintahan yang hanya satu dua bulan saja. Dalam keadaan demikian, maka pembangunan mustahil berjalan. Kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang menjadi cita-cita kemerdekaan kita akan bertambah jauh.

Ringkasnya, suasana nasional sama sekali tidak mendukung iklim pembangunan untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Sebagai bangsa kita menyimpulkan bahwa semuanya tadi terjadi karena kita tidak setia dan menyimpang dari Pancasila dan UUD'45.

Itulah sebabnya, Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD'45 secara murni dan konsekuen.

Itulah sebabnya mengapa rakyat melalui Ketetapan MPRS No. XXII tahun '66 memberi amanat kepada Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (Gotong Royong) untuk membuat undang-undang yang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan.

Sangatlah jelas bahwa untuk menciptakan suasana yang mendorong pembangunan bukan hanya penyederhanaan struktur kepartaian yang kita perlukan. Yang tidak kalah penting adalah juga pembaharuan semangat, sikap dan gerak kekuatan-kekuatan politik kita. Karena Orde Baru menghendaki ketertiban yang mantap dan berkembangnya demokrasi yang sehat, maka penyederhanaan jumlah wadah kekuatan sosial politik ini pun dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Penyederhanaan struktur politik tidak dilakukan dengan paksaan, tidak dengan pembubaran partai-partai politik. Kita percaya pada demokrasi. Karena itu, cara-cara yang kita tempuh juga harus demokratis.

Pembahasan undang-undang mengenai partai politik dan mengenai organisasi kemasyarakatan ternyata mengalami jalan

buntu, karena tidak diperoleh kesepakatan. Pimpinan partai-partai politik tidak dapat menemukan jalan untuk melaksanakan penyederhanaan dan pembaharuan kehidupan politik.

Karena itu, Presiden selaku Mandataris MPR(S) waktu itu mengambil prakarsa sebagai terobosan atas macetnya penanganan masalah yang sangat penting bagi pelaksanaan kehidupan demokrasi pada umumnya dan pelaksanaan pemilihan umum khususnya. Prakarsa Presiden yang kemudian dimusyawarahkan secara intensif dengan pimpinan kekuatan sosial politik itu justru untuk mencegah keputusan yang sepihak atau yang otoriter.

Presiden mengemukakan gagasan kepada semua pimpinan Partai-partai Politik dan Golongan Karya, bahwa pembaharuan kehidupan politik kita harus berpangkal pada konsensus nasional Orde Baru, ialah tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD '45 secara murni dan konsekuen.

Ini berarti bahwa asas kekuatan sosial politik tidak bisa lain dari Pancasila dan tujuannya juga tidak bisa lain dari membangun masyarakat Pancasila. Karena membangun masyarakat Pancasila berarti membangun manusia seutuhnya, maka pembangunan pun berarti pembangunan lahir dan pembangunan batin, pembangunan material dan pembangunan spiritual, pembangunan kehidupan di dunia untuk bekal kehidupan di akhirat. Sedangkan pelaksanaannya harus seimbang, sehingga dapat terus mempertinggi harkat dan martabat manusia. Karena itulah dasar yang sehat bagi pembaharuan kehidupan politik dan penyederhanaan struktur politik bukanlah ideologi golongan, melainkan orientasi pada pembangunan masyarakat Pancasila. Jelasnya, kekuatan-kekuatan sosial politik dengan berasaskan pada satu ideologi Pancasila perlu memusatkan perhatiannya pada pembangunan material tanpa mengabaikan pembangunan spiritual, atau pada pembangunan spiritual tanpa mengabaikan pembangunan material, atau mengusahakan pembangunan dengan karya-karya yang menyeimbangkan pembangunan material dan spiritual itu sekaligus.



Atas dasar pokok-pokok pemikiran tadi, maka Partai-partai Politik dan Golongan Karya yang ada waktu itu dapat disederhanakan pengelompokannya menjadi tiga kekuatan sosial politik. Yang pertama, adalah kelompok yang memperjuangkan tercapainya masyarakat Pancasila melalui pembangunan yang menitikberatkan bidang spiritual tanpa mengabaikan bidang material; yaitu kelompok yang terdiri dari partai-partai: NU, MI, PSII dan Perti. Yang kedua, adalah kelompok yang memperjuangkan terwujudnya masyarakat Pancasila melalui pembangunan yang menitikberatkan bidang material tanpa mengabaikan bidang spiritual; yaitu kelompok yang terdiri dari partai-partai: PNI, IPKI, MURBA, PARKINDO dan Partai Katholik. Yang ketiga, adalah kelompok yang memperjuangkan terwujudnya masyarakat Pancasila melalui pembangunan yang seimbang bidang spiritual maupun material, ialah kelompok Golongan Karya.

Pokok-pokok pikiran itulah yang menjadi kesepakatan bersama. Kesepakatan ini kemudian menjadi pembuka jalan ke arah penyederhanaan jumlah kekuatan sosial politik menjadi tiga seperti yang kita kenal sekarang; yaitu dua Partai Politik dan satu Golongan Karya.

Namun pada waktu itu, undang-undang mengenai kepartaian dan keormasan belum juga dapat diselesaikan oleh Pemerintah bersama-sama DPR sampai pelaksanaan Pemilihan Umum '71, sehingga dalam Pemilihan Umum tahun '71 peserta pemilihan umum masih terdiri dari 9 Partai Politik dan Golongan Karya.

Selanjutnya, walaupun penyederhanaan struktur politik belum juga berhasil terlaksana berdasarkan undang-undang, namun arah penyederhanaan itu telah mulai dilaksanakan dalam praktek di DPR. Dalam DPR hasil Pemilihan Umum '71 dapat dibentuk empat fraksi yang terdiri dari dua fraksi Partai Politik, satu fraksi Golongan Karya dan satu fraksi ABRI. Dua fraksi Partai Politik, ialah Fraksi Persatuan Pembangunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mewakili partai-partai: NU, MI, PSII dan Perti; dan Fraksi Demokrasi Indonesia yang terdiri dari anggota-

anggota yang mewakili partai-partai: PNI, IPKI, MURBA, PARKINDO dan Partai Katholik.

Pertumbuhan fraksi-fraksi di DPR tadi, disertai oleh tekad untuk melembagakan fraksi-fraksi itu menjadi organisasi politik yang mantap, makin ditegaskan dalam GBHN sebagai hasil Sidang Umum MPR tahun '73.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan GBHN itu dan juga dalam rangka persiapan Pemilihan Umum tahun '77 dapatlah dihasilkan Undang-undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang menetapkan adanya dua Partai Politik dan satu Golongan Karya, yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1975. Dan berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum yang disempurnakan juga ditetapkan bahwa peserta Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tahun '77 terdiri dari dua Partai Politik dan Golongan Karya.

Dalam pada itu partai-partai politik yang ada waktu itu bersepakat untuk mengadakan fusi. Kesepakatan itu menghasilkan Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri dari penggabungan partai-partai: NU, MI, PSII dan Perti; dan Partai Demokrasi Indonesia yang terdiri dari penggabungan partai-partai: PNI, IPKI, MURBA, PARKINDO dan Partai Katholik.

Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk menyederhanakan struktur wadah-wadah kekuatan politik kita sampai dapat dihasilkan undang-undang yang memberikan jaminan dan kedudukan hukum kepada Partai Politik dan Golongan Karya. Undang-undang ini sekaligus juga merupakan pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Dasar '45; yaitu bahwa: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Semuanya itu menunjukkan kesabaran, ketabahan hati, sikap arif bijaksana dan bobot kenegarawanan para pemuka bangsa untuk maju bersama-sama secara demokratis dalam rangka membangun dan menata kembali kehidupan politik, agar sesuai dengan tuntutan pelaksanaan pembangunan bangsa di segala bidang.

Seperti pernah saya katakan, pembangunan demokrasi dan pembangunan politik memang merupakan bagian yang sulit dari pembangunan bangsa kita.

Sementara itu, dengan Ketetapan MPR Nomor II tahun '78 kita memiliki P4 sebagai upaya kita untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila.

P4 ini terus menerus kita masyarakatkan. Demikianlah, maka pembaharuan kehidupan politik --khususnya penyederhanaan struktur kekuatan politik-- lebih dimantapkan lagi dengan penegasan kita bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adanya asas lain di samping asas Pancasila yang menjadi ciri khas dari wadah kekuatan politik akan merangsang unsur-unsur ekstrim untuk lebih menonjolkan asas yang lain itu pada saat-saat perjuangan politik mencapai bentuknya yang nyata, seperti pada masa kampanye menjelang pemilihan umum. Naluri untuk menunjukkan identitas golongan, akan menonjolkan asas yang dianggap sebagai ciri khasnya masing-masing dalam masa kampanye. Ini akan mudah merangsang fanatisme kelompok yang sempit, yang dapat dimanfaatkan oleh golongan ekstrim yang terdapat dalam kelompok yang bersangkutan atau di luarnya. Fanatisme golongan tidak menguntungkan siapapun, malahan dapat menjadi bibit perpecahan dan gejolak yang sulit dikendalikan.

Marilah kita semua menghormati konsensus nasional yang telah kita mufakati dengan susah payah dan memakan waktu panjang.

Janganlah konsensus nasional ini kita kotak-katik lagi hanya untuk memenuhi ambisi-ambisi pribadi atau golongan.

Jika kita belum puas dengan peranan ketiga wadah kekuatan politik yang kita miliki, maka marilah kita perbaiki wadah yang telah ada. Bukan dengan membuat wadah baru yang sama sekali tidak jelas dukungannya dari rakyat.

Perbedaan pendapat dan perjuangan politik adalah sah dan sehat dalam kehidupan demokrasi. Tetapi jalan yang ditempuh

haruslah pula jalan-jalan yang demokratis, konstitusional dan menurut jalur hukum.

Memaksakan kehendak atau memaksa perubahan dengan jalan kekerasan, perusakan dan pembakaran gedung-gedung dan fasilitas umum adalah tindakan anarki; tidak demokratis dan tidak bertanggung jawab.

Pemerintah manapun memikul tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari tindakan anarkis, dari manapun datangnya dan apapun alasannya. Itulah sebabnya alat-alat keamanan negara bertindak tegas dalam mengatasi kerusuhan 27 Juli di Ibukota baru-baru ini. Kerusuhan itu tidak ada sangkut pautnya dengan demokrasi. Penggerak dan pelaku kerusuhan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Kita merasa lega bahwa kerusuhan itu bisa diatasi dalam waktu yang singkat, sehingga tidak menjalar kemana-mana. Memang ada keguncangan sesaat, tetapi stabilitas ekonomi segera pulih kembali dan dunia luar tetap menaruh kepercayaan terhadap perekonomian kita. Ini menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi kita bertambah kukuh.

Pemerintah menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada ABRI yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Cara-cara ABRI memadamkan kerusuhan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga.

Stabilitas politik dan keamanan dapat dikatakan telah pulih kembali. Roda-roda perekonomian telah berputar kembali secara penuh.

Saudara Ketua dan Sidang Dewan yang saya hormati;

Apa pun yang kita lakukan tidak ada artinya bagi rakyat kalau tidak ada perbaikan dalam kehidupannya. Segala sesuatu yang kita lakukan baru ada manfaatnya kalau menghasilkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Orde Baru lahir memang mengemban amanat untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat ini.

Untuk itulah kita membangun. Telah lima REPELITA kita lalui, satu tahap pembangunan jangka panjang telah kita lewati. Sekarang kita sedang memasuki tahap Pembangunan Jangka Panjang Kedua. REPELITA VI bahkan telah separuhnya kita lalui.

Kita bersyukur bahwa apa yang menjadi harapan pada awal Orde Baru telah dapat kita wujudkan. Bangsa Indonesia sekarang tidak lagi termasuk dalam kelompok negara miskin di dunia.

Saat kita memperingati 50 tahun Indonesia Merdeka, pendapatan per kapita bangsa kita telah melampaui 1.000 dolar Amerika. Angka ini empat belas kali lebih tinggi dibandingkan pada awal Orde Baru. Dalam nilai nyata, pendapatan tadi meningkat lebih dari tiga kali. Hal ini bisa terwujud karena selama kita membangun pertumbuhan ekonomi dapat kita dorong cukup tinggi, sehingga mencapai rata-rata 6,8% setahun. Dalam dua tahun REPELITA VI ini gambarannya tetap menggembirakan, yaitu bahwa ekonomi kita tumbuh dengan 7,5% dalam tahun '94 dan 8,1% dalam tahun '95.

Pertumbuhan bukanlah tujuan akhir pembangunan ekonomi. Pertumbuhan adalah cara yang perlu kita tempuh untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat secara berkeadilan. Angka pertumbuhan menunjukkan bagaimana kemajuan yang dicapai oleh perekonomian, dan bukan satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan. Demikian juga angka pendapatan per kapita.

Ada ukuran lain yang tidak kalah pentingnya. Bahkan, menjadi lebih penting kalau kita melihat pembangunan sebagai perjuangan besar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat; yaitu bagaimana rakyat menikmati hasil kemajuan, atau dengan kata lain pemerataan.

Sejak awal, kita menghayati pembangunan nasional kita itu sebagai pengamalan Pancasila. Ini berarti tujuan akhir pembangunan kita adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Trilogi Pembangunan merupakan kebijakan dasar

pembangunan kita. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih besar kita wujudkan pemerataan.

Kita bersyukur bahwa jika pada awal pembangunan dahulu sedikitnya 60 dari setiap 100 orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, maka sekarang hanya tinggal kurang dari 14 dari setiap 100 orang Indonesia yang tergolong sangat miskin. Dengan berbagai program, kita akan berjuang bersama-sama agar selambat-lambatnya dalam dua REPELITA kita dapat menghapus kemiskinan absolut ini.

Keadilan sosial haruslah mencerminkan kemampuan masyarakat untuk hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan. Martabat kemanusiaan erat berkaitan dengan kemandirian, dan untuk mandiri seseorang memerlukan pekerjaan yang layak.

Lapangan pekerjaan yang telah kita buka selama ini bukan main luasnya. Antara tahun '71 sampai tahun '95, kita telah menciptakan hampir 44 juta lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian, tingkat pengangguran telah dapat kita pangkas menjadi kurang lebih separuhnya. Angka tadi lebih besar dari jumlah penduduk banyak negara. Bahkan, lebih besar dari jumlah penduduk beberapa negara dijadikan satu.

Bukan hanya lapangan pekerjaan yang bertambah, tetapi pekerja Indonesia pun meningkat produktivitasnya. Antara tahun '85 sampai '95 saja peningkatannya hampir sekitar dua kali lipat.

Adalah adil bahwa peningkatan produktivitas tidak dinikmati hanya oleh para pengusaha pemilik modal, tetapi juga oleh para pekerja.

Karena itu --terutama sejak REPELITA VI-- upah pekerja minimum yang ditetapkan berdasarkan wilayah atau UMR, telah disesuaikan secara berkala setiap tahun. Pada tahun '95 UMR itu telah meningkat 55% dibandingkan tahun '93. Sekarang ini UMR telah mencapai sekitar 90% dari kebutuhan hidup minimum, dan telah melampaui kebutuhan fisik minimum.

Upah yang layak juga merupakan bagian dari upaya mulia kita untuk menempatkan kedudukan manusia sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Perbaikan upah itu meningkatkan daya beli rumah tangga pekerja yang jumlahnya besar, yaitu berjumlah lebih dari 81 juta pekerja pada tahun '95. Peningkatan daya beli ini juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang tidak kalah penting adalah: menciptakan dan memperluas pasar; bukan hanya bagi produk-produk industri, tetapi juga bagi produk pertanian sehingga juga mendukung pertumbuhan di sektor pertanian dan mendorong peningkatan pendapatan petani.

Peningkatan produktivitas menunjukkan peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan para pekerja dan rakyat Indonesia pada umumnya. Di bidang-bidang ini memang tercatat kemajuan yang besar, yang juga diakui oleh dunia internasional. Jumlah penduduk yang buta aksara telah berkurang dari sekitar 40% pada tahun '71 menjadi kurang dari 14% pada tahun '95. Dewasa ini seluruh anak usia sekolah telah mengikuti pendidikan dasar, meskipun masih ada yang tidak dapat menyelesaikannya terutama karena masalah ekonomi keluarganya. Perbaikan-perbaikan juga terjadi dalam jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan di sekolah-sekolah kejuruan. Tantangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini sangatlah besar. Misalnya dengan memacu berbagai program akan diperlukan waktu tidak kurang dari 3 REPELITA agar seluruh anak Indonesia mengenyam pendidikan dasar 9 tahun.

Pelayanan kesehatan masyarakat telah sangat berkembang. Di seluruh pelosok Tanah Air telah tersebar sekitar 7.000 Puskesmas dan 21.000 Puskesmas Pembantu yang didukung oleh ribuan dokter, tenaga paramedis dan bidan. Dewasa ini telah ditempatkan 49.000 bidan di desa. Ini berarti, di antara 10 desa hanya sebuah desa saja yang belum ada bidannya.

Berbagai upaya di bidang kesehatan itu --ditambah dengan perbaikan gizi-- telah menurunkan angka kematian bayi, telah menaikkan tahun harapan hidup, telah menurunkan pertumbuhan

penduduk dan telah memperbaiki mutu kehidupan lahir batin lainnya.

Pembangunan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat memang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan sektor pertanian. Swasembada pangan telah membuat bangsa Indonesia menjadi makin mandiri. Dan ini, merupakan unsur yang amat utama dalam ketahanan ekonomi nasional. Penduduk kita jumlahnya besar. Jadi, ketersediaan pangan selalu merupakan masalah pokok bagi kita di masa lalu, di masa kini maupun di masa datang.

Dengan swasembada pangan kita sekaligus membangun kemandirian, dan menjamin kesempatan bagi kaum petani untuk memanfaatkan pasar pangan dalam negeri yang demikian besarnya. Melalui berbagai kebijakan program dan upaya, maka dewasa ini produksi padi mencapai rata-rata 4,35 ton setiap hektar, yang berarti naik lebih dari dua kali lipat jika dibanding dengan tahun '68 pada waktu produksi rata-rata baru sebesar 2,13 ton. Hasil peningkatan ini dinikmati langsung oleh petani.

Kesejahteraan petani kita dewasa ini telah meningkat. Meskipun memang belum merata pada semua rumah tangga petani, namun kita melihat banyak rumah petani yang telah dilengkapi dengan peralatan hidup modern, bahkan di banyak desa yang terpencil sekalipun telah menjulang antena-antena parabola. Banyak rumah tangga petani telah memiliki berbagai jenis kendaraan bermotor. Bertambah banyaknya jemaah haji dari kalangan keluarga petani merupakan bukti meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan ekonomi para petani.

Peningkatan produktivitas pertanian kita adalah hasil pengembangan dan penerapan teknologi pertanian yang sudah sangat meluas di kalangan masyarakat tani. Budaya para petani kita sudah mulai berubah: tidak lagi semata-mata agraris dalam arti menggantungkan diri kepada alam, tetapi telah menyerap nilai-nilai modern. Dalam bidang pertanian pun telah berkembang budaya iptek dan semangat industri. Perkembangan ini sangat



penting bagi bangsa kita untuk memasuki era tinggal landas, era industrialisasi.

Pertanian tidak bisa tanpa air. Kemajuan pertanian dimungkinkan oleh karena ketersediaan air yang makin luas, berkualitas dan dapat diandalkan. Sekarang areal persawahan beririgasi telah mencapai hampir 6 juta hektar atau 70% dari 8,5 juta hektar areal persawahan yang ada di Indonesia.

Mengingat terbatasnya lahan di Pulau Jawa --dan berkurangnya areal persawahan di Pulau Jawa karena meningkatnya kebutuhan lahan untuk industri dan perumahan-- maka kita telah membangun areal persawahan baru di berbagai daerah. Di Kalimantan Tengah kita manfaatkan lahan gambut seluas kurang lebih 1 juta hektar. Biayanya memang akan besar. Tetapi, langkah ini harus kita tempuh. Kalau kita tidak lakukan sekarang, maka kita akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan di kemudian hari, dengan bertambahnya penduduk Indonesia. Penduduk dunia juga terus bertambah. Padahal, areal pertanian dunia tidak bertambah. Jadi, tetap ada kemungkinan dari waktu ke waktu di dunia terjadi kelangkaan pangan, khususnya beras.

Dalam mengembangkan areal persawahan di tanah rawa, kita senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Bagi kita lingkungan hidup telah menjadi salah satu faktor yang turut menentukan --bahkan pada kegiatan-kegiatan tertentu paling menentukan-- dalam kita merancang dan melaksanakan berbagai program pembangunan. Yang kita perhatikan bukan hanya lingkungan alam, tetapi juga lingkungan sosial.

Pembangunan ekonomi memerlukan investasi yang besar. Bersamaan dengan investasi dalam sumber daya manusia, maka investasi di bidang prasarana juga teramat penting. Pembangunan prasarana sekaligus kita arahkan untuk mewujudkan pemerataan.

Untuk negara yang luas dan berkepulauan seperti Indonesia, yang penduduknya besar, maka prasarana perhubungan tidak

hanya menjadi alat ekonomi yang pokok, tetapi juga merupakan wahana pengikat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka Wawasan Nusantara.

Sejak awal pembangunan sampai tahun kedua REPELITA VI kita telah membangun tidak kurang dari 267.000 kilometer jalan baru; berupa jalan-jalan arteri, kolektor dan lokal. Jalan baru yang telah kita bangun itu hampir tujuh kali panjang keliling bumi yang melingkari khatulistiwa.

Sekarang kita sudah bisa melakukan perjalanan hampir tidak terputus dari Sabang di Aceh sampai ke Los Palos di Timor Timur, melalui jalan raya atau kereta api dan di antara pulau-pulau disambung dengan feri-feri penyeberangan.

Perjalanan dari Manado ke Ujung Pandang telah dapat ditempuh melalui jalan darat. Dari 3.900 kilometer lebih rencana pembangunan jalan lintas Sulawesi, maka lebih dari 3.500 kilometer telah diselesaikan. Sisanya, yakni lintas Sulawesi bagian timur akan dilanjutkan dan diselesaikan sebelum REPELITA VII berakhir. Di Kalimantan, jalan lintas sepanjang 2.900 kilometer sebagian besar sudah dibangun. Hanya tersisa 75 kilometer yang menghubungkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, termasuk jembatan sungai Barito yang panjangnya 901 meter dan akan diselesaikan dalam REPELITA VI ini.

Jalan lintas Irian sepanjang 2.300 kilometer lebih --yang membentang dari Sorong, Manokwari, Nabire, sampai Wamena-- akan bertemu dengan lintas perbatasan Jayapura--Merauke di kota Yeti. Sampai pertengahan REPELITA VI telah dibangun lebih dari 1.600 kilometer. Sedangkan sisanya akan diselesaikan dalam REPELITA VI ini dan REPELITA VII yang akan datang, bersama dengan sekitar 300 kilometer jalan perbatasan yang masih terputus. Untuk itu, pada tahun ini akan diselesaikan jembatan kabel gantung menyeberangi sungai Mamberamo sepanjang 235 meter.

Pembangunan jalan lintas pulau-pulau besar itu tidak mudah dan banyak kendalanya. Kondisi geografis berupa tanah yang berawa, bersungai dan bergunung-gunung serta curah hujan yang

tinggi, menyebabkan biayanya mahal dan memakan waktu untuk pembangunannya. Namun, artinya penting sekali bagi pembangunan daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi setempat.

Pembangunan jalan-jalan lintas di banyak pulau yang lebih kecil pun tidak kita lupakan. Misalnya, jalan lintas utara Flores sepanjang 651 kilometer akan rampung pembangunannya pada tahun ini. Dari rencana jalan lintas Seram yang panjangnya 446 kilometer, telah dibangun 330 kilometer. Pembangunannya sedang dilanjutkan untuk diselesaikan dalam REPELITA VI ini juga.

Tidak terbilang banyaknya jalan desa yang juga telah dibangun, yang membuat desa-desa kita bangkit dan menembus keterasingan. Jalan-jalan desa ini dibangun secara gotong royong oleh masyarakat desa sendiri, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sebagai negara kepulauan, perhubungan laut merupakan urat nadi kehidupan bangsa dan perekonomian nasional dan daerah. Selama ini kita telah membangun 390 pelabuhan besar dan kecil, yang lebih dari separuhnya berada di kawasan timur Indonesia. Fasilitas-fasilitas pelabuhan kita dewasa ini mampu menampung 115 juta ton lebih barang; baik yang diangkut oleh pelayaran samudera, pelayaran nusantara, pelayaran lokal maupun pelayaran rakyat. Kemampuan tadi berlipat ganda dibanding dengan hanya 3,25 juta ton pada masa awal pembangunan dahulu. Wilayah-wilayah terpencil dilayani oleh pelayaran perintis yang mencakup 270 pelabuhan: mulai dari Kepulauan Siberut di pantai barat Sumatera sampai Kepulauan Sangir Talaud di ujung utara Sulawesi serta Kepulauan Aru dan Tanimbar di bagian paling timur laut Arafura.

Untuk negara yang luas seperti Indonesia, selain perhubungan laut, perhubungan udara juga penting. Selama masa-masa pembangunan jumlah dan kemampuan bandar udara sangat meningkat. Kita juga membangun 118 bandar udara kecil, yang sebagian besar berada di kawasan timur Indonesia, yang melayani

penerbangan perintis dan penerbangan di wilayah-wilayah terpencil dan pedalaman.

Pembangunan prasarana perhubungan dalam berbagai matra itu telah meningkatkan dan menciptakan kegiatan perekonomian, mendorong pertumbuhan dan pemerataan serta memantapkan stabilitas nasional. Jarak yang tadinya jauh menjadi terasa dekat, sehingga makin erat pula tali pengikat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang satu.

Hubungan yang makin erat dan lancar tidak hanya untuk lalu lintas orang dan barang, tetapi juga hubungan jarak jauh yang dilakukan melalui telepon dan Surat telah banyak meningkat. Selama masa pembangunan ini kapasitas telepon telah meningkat hampir 28 kali, menjadi 4,8 juta satuan sambungan, atau dengan tingkat kepadatan 2,5 per 100 penduduk. Hubungan ke luar negeri telah lancar sehingga sangat menunjang keperluan dunia usaha dan menciptakan iklim investasi dan suasana bisnis yang menarik di Indonesia.

Sambungan telepon tidak hanya menjalin kota-kota besar, tetapi juga sampai ke ibukota kecamatan dan bahkan telah masuk ke wilayah perdesaan. Dari hampir-hampir tidak ada, maka dewasa ini lebih dari separuh ibukota-ibukota kecamatan telah bisa berkomunikasi melalui sarana telepon. Telepon juga masuk ke lebih dari 38.000 desa, yang mencakup lebih dari 58% desa di seluruh Indonesia.

Di samping sebagai prasarana ekonomi yang penting, maka pembangunan listrik secara besar-besaran telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, sampai ke semua pelosok. Kapasitas tenaga listrik telah meningkat 23 kali dibandingkan dengan pada awal kita membangun. Separuh dari rumah tangga telah memperoleh sambungan listrik. Lebih dari 39.000 desa diterangi listrik di malam hari, yang berarti menjangkau lebih dari 61% dari seluruh desa.

Tingkat kesejahteraan dan kesehatan rakyat makin tinggi dengan bertambahnya penyediaan air bersih yang merupakan

salah satu kebutuhan pokok manusia. Dewasa ini sebagian besar penduduk perkotaan --yaitu sekitar 83%-- telah menikmati air bersih. Sedangkan penduduk perdesaan yang dapat menikmati layanan air bersih telah mencapai lebih dari 55%.

Kebutuhan hidup yang paling pokok lainnya adalah perumahan. Cita-cita untuk menyediakan papan yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia memang belum terpenuhi. Jumlah rakyat kita besar sekali, sehingga tidak akan mudah untuk memenuhi kebutuhan itu dalam waktu yang cepat. Walaupun demikian, sampai sekarang telah dibangun lebih dari 1 juta rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, yang membuat berjuta-juta suami, isteri dan anak-anak sangat berbahagia.

Pembangunan perumahan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi sebagian besar --sekitar 85%-- dibangun oleh masyarakat sendiri. Pemerintah lebih banyak memberikan bantuan melalui kebijaksanaan yang merangsang pembangunan perumahan yang mencerminkan rasa keadilan, serta memberikan dukungan untuk investasi di bidang perumahan bagi rakyat kecil. Sejak dimulainya program ini pada tahun '76, maka sampai sekarang kredit pemilikan rumah telah mencapai lebih dari Rp.6 triliun.

Bagian yang sangat penting lainnya dari upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah pembangunan wilayah perdesaan, yang tersebar di seluruh Tanah Air. Berbagai program telah dikembangkan untuk memajukan masyarakat dan wilayah perdesaan. Semua kegiatan pertanian pada dasarnya adalah pembangunan perdesaan. Pembangunan prasarana juga memiliki program-program perdesaan; seperti jalan, listrik dan air bersih perdesaan. Program pendidikan dasar melalui Inpres SD dan pembangunan kesehatan masyarakat desa melalui Inpres Kesehatan sebagian besar berada di wilayah perdesaan. Bahkan secara khusus ada Inpres Desa yang tujuannya adalah membangun perdesaan dengan merangsang berkembangnya potensi masyarakat desa sendiri. Dalam Inpres-inpres lainnya --seperti Inpres Dati I

dan Dati II-- juga ada unsur-unsur yang berkenaan dengan pembangunan perdesaan. Inpres Desa Tertinggal (IDT), khusus tertuju ke wilayah perdesaan. Selain itu, untuk desa-desa non-IDT ada pula program penanggulangan kemiskinan yang sumber dananya berasal dari sumbangan masyarakat yang telah lebih mampu.

Desa adalah tempat berakarnya bangsa Indonesia. Sebagian besar rakyat sekarang ini masih hidup di perdesaan. Karena itu, membangun perdesaan sangat strategis sifatnya dalam membangun kesejahteraan yang merata. Melalui pembangunan perdesaan kita ingin mengatasi masalah ketidakadilan, yang tercermin dalam kesenjangan dan kemiskinan.

Dengan memberikan perhatian yang besar pada pembangunan perdesaan, tidak berarti pembangunan perkotaan diabaikan; lebih-lebih karena penduduk perkotaan bertambah terus. Diperkirakan penduduk perkotaan tiap tahun bertambah sekitar 3 juta. Jika kecenderungan ini berjalan terus, pada akhir PJP II bagian terbesar penduduk Indonesia sudah akan berada di kota-kota.

Dengan sendirinya, perpindahan penduduk dalam jumlah besar seperti itu akan memberi tekanan kepada kehidupan di perkotaan. Gejala-gejala ke arah ini telah terasa di kota-kota kita dewasa ini berupa timbulnya berbagai masalah sosial seperti kejahatan, kekerasan, ketidaksabaran, dekadensi dan merosotnya mutu lingkungan. Inilah sebabnya mengapa di kota-kota lebih gampang timbul konflik. Keadaan menjadi lebih rawan, jika potensi konflik ini disalahgunakan untuk tujuan-tujuan politik. Masalah perkotaan ini diatasi dengan memperbanyak prasarana ekonomi dan sosial serta meningkatkan pelayanan umum, yang tuntutananya lebih tinggi dan lebih beragam di kota-kota. Pembangunan wilayah perdesaan akan dapat menahan derasnya arus perpindahan penduduk ke kota-kota tadi.

Yang terus diusahakan adalah agar mereka yang berpendidikan, tetap kerasan tinggal di perdesaan dan menjadi pelopor modernisasi. Untuk itulah maka telah dimulai langkah-

langkah industrialisasi perdesaan, yang bertumpu pada pengembangan agrobisnis dan agroindustri. Untuk menarik tenaga berpendidikan agar tetap berada di desa, kewirausahaan harus dikembangkan, didukung oleh sarana yang diperlukan seperti modal dan teknologi.

Secara keseluruhan pembangunan perdesaan dan perkotaan dipadukan saling terkait dan saling menunjang dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Pemerintah telah mencurahkan bagian yang cukup besar dari dana pembangunan untuk mendorong pembangunan daerah. Secara langsung melalui Inpres-inpres dan dana Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah menyalurkan anggaran pembangunan ke daerah untuk digunakan sesuai kebutuhan di daerah. Bahkan, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan seluruhnya telah dikembalikan ke daerah.

Sumbangan yang penting dan besar bagi pembangunan daerah adalah transmigrasi. Salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak daerah dan menjadi kendala pembangunannya adalah kekurangan sumber daya manusia. Kekurangan ini dicoba diatasi melalui program transmigrasi, sekaligus dengan menyalurkan kelebihan tenaga kerja dari wilayah yang padat penduduknya. Pelaksanaan transmigrasi ini ada yang berhasil, ada Pula yang kurang berhasil. Akan tetapi, dengan pengalaman yang makin banyak, maka program ini telah makin sempurna dan risiko kegagalannya makin kecil.

Berkat adanya transmigrasi, daerah-daerah yang tadinya termasuk rawan pangan sekarang telah menjadi daerah surplus dan menyumbang pada ketersediaan dan ketahanan pangan nasional. Kegiatan transmigrasi yang semula hanya berorientasi pada pangan telah diperluas dengan kegiatan lain; seperti perkebunan-- antara lain dengan pola PIR-trans-- dan kehutanan dengan pola HTI-trans. Hasilnya sangat baik dan membangkitkan banyak minat untuk bertransmigrasi, termasuk minat bertransmigrasi atas prakarsa sendiri.

Pembangunan daerah juga dipercepat dengan berbagai kerjasama subregional dengan negara-negara tetangga, yang melibatkan banyak propinsi kita baik di kawasan barat maupun di kawasan timur Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat;

Dengan bertambah baiknya kesejahteraan rakyat, dengan pembangunan perdesaan dan meluasnya pembangunan daerah, maka bertambah kukuhlah landasan yang kita perlukan untuk bergerak menjadi negara industri.

Kita berbesar hati bahwa industri nasional dalam PJP I dan berlanjut sampai REPELITA VI ini terus tumbuh dengan kecepatan yang cukup tinggi. Memang dewasa ini ada perlambatan dalam tingkat pertumbuhan, karena antara lain pengaruh perkembangan pasar internasional. Namun tentu bukan hanya faktor itu saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekspor. Kita menghadapi persaingan yang makin ketat dari negara-negara berkembang lain yang baru saja memulai industrialisasinya. Selain itu permintaan yang besar di dalam negeri sendiri berpengaruh pada ekspor kita, baik karena hambatan ketersediaan produk untuk ekspor maupun karena harga di pasar dalam negeri yang lebih baik.

Kemajuan di bidang industri telah mendorong perubahan struktur perekonomian kita, bahkan melampaui sasaran REPELITA VI. Bila pada awal REPELITA I sumbangan industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru mencapai 9,2%, maka pada tahun '95 telah jauh meningkat menjadi 24,3%. Angka ini sudah melampaui sasaran tahun terakhir REPELITA VI, yakni sebesar 24,1%. Sedangkan sumbangan pertanian terhadap PDB telah menurun, dari 49,3% pada awal REPELITA I menjadi 17,2% pada tahun '95. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran struktur perekonomian dari titik berat pada bidang pertanian menuju bidang industri, sesuai dengan strategi pembangunan ekonomi kita.



Yang amat menggembirakan adalah bahwa industri kecil berperan pula dalam ekspor, yakni menghasilkan 2,1 miliar dolar Amerika. Jumlah ini memang hanya 7,2% dari total ekspor hasil industri pengolahan nonmigas. Tetapi, industri kecil ini menyerap banyak sekali tenaga kerja, sehingga memperluas pemerataan.

Pembinaan industri kecil dan menengah akan terus dilanjutkan sehingga pada saatnya akan terbentuk struktur industri nasional yang kukuh dan andal dengan industri menengah sebagai tulang punggungnya, saling menunjang dengan industri besar yang berbasis makin luas dan industri kecil yang tangguh dan mandiri.

Dalam upaya itu tersedianya modal bagi usaha kecil amatlah penting. Sejak awal PJP I telah disediakan berbagai fasilitas kredit untuk usaha kecil dengan persyaratan ringan. Melalui penyempurnaan sistem perkreditan pada awal tahun '90 berbagai pola perkreditan itu dikonsolidasikan ke dalam Kredit Usaha Kecil (KUK). Pada akhir tahun '90 itu nilai KUK yang disalurkan mencapai Rp.21 triliun lebih, yang diberikan kepada sekitar 3,7 juta pengusaha kecil. Hanya dalam lima tahun --yaitu tahun 1995/96-- KUK telah meningkat dua kali lipat menjadi Rp.42 triliun lebih, yang dinikmati oleh lebih dari 6,7 juta pengusaha kecil. Jumlah kredit usaha kecil tadi hampir seperempat dari seluruh kredit perbankan. Upaya yang sungguh-sungguh untuk mengangkat pengusaha kecil ini tampak jelas dalam Kupedes. Waktu dilancarkan pertama kali pada tahun 1983/84, kredit yang disalurkan baru sebesar Rp.30,7 miliar untuk sekitar 161 ribu orang. Dewasa ini jumlah itu melonjak menjadi Rp.3,3 triliun dan diberikan kepada 2,3 juta orang.

Selain kredit dari perbankan ada berbagai paket pendanaan lain, seperti modal ventura yang sekarang sedang dikembangkan dengan mengikutsertakan dunia usaha. Secara khusus sejumlah pengusaha besar telah sepakat untuk menghimpun dana guna membantu pengembangan usaha kecil melalui berbagai program kemitraan. Selain itu ada pula dana yang disisihkan dari keuntungan BUMN untuk membantu pengusaha kecil.

Upaya membangun lapisan ekonomi masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah secara strategis diarahkan melalui koperasi. Pembangunan koperasi ini sesuai dengan amanat konstitusi. Kita juga yakin bahwa melalui koperasi kita dapat membangun demokrasi ekonomi di atas landasan yang kukuh.

Pada awal kita membangun, jumlah koperasi barulah mencapai 9.000 lebih dengan anggota sebanyak 1,5 juta orang. Sekarang jumlah koperasi telah berkembang menjadi lebih dari 46.000 dengan 26,3 juta anggota. Kegiatan koperasi telah menyebar ke seluruh pelosok. Sekarang telah ada 9.200 Koperasi Unit Desa (KUD) yang berkembang menjadi penggerak kegiatan ekonomi di perdesaan. Bahkan, ada hampir 6.000 KUD yang telah menjadi koperasi yang maju dan mandiri. Koperasi di perkotaan pun telah berkembang, seperti koperasi karyawan.

Bidang usaha koperasi telah makin meluas pula. Semula, bidang usaha koperasi pada umumnya terbatas hanya pada usaha simpan pinjam, penyaluran sarana produksi pertanian dan pemasaran hasil pertanian. Sekarang usaha koperasi telah meliputi bidang-bidang perkebunan, perikanan, peternakan, kerajinan tangan, industri logam dan tambang rakyat, angkutan, jasa listrik perdesaan, jasa telekomunikasi dan sebagainya.

Meningkatnya kegiatan itu tampak pada nilai usaha koperasi yang semakin meningkat. Pada awal PJP I nilai usaha koperasi baru mencapai Rp.74 miliar. Dan, dalam tahun 1995/96 telah menjadi Rp.10,8 triliun. Sungguh, suatu peningkatan yang luar biasa.

Kita tetap menyadari, bahwa perkembangan koperasi belum mencapai taraf yang kita dambakan. Perannya dalam perekonomian nasional masih terlalu kecil. Kedudukannya dalam struktur dunia usaha masih sangat lemah. Karena itu, kita harus terus meningkatkan segala daya upaya yang selama ini telah kita lakukan.

Berkembangnya usaha kecil dan koperasi akan memperluas pemerataan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya

itu, juga akan memantapkan kemandirian ekonomi bangsa karena meningkatnya kemandirian masyarakat dan warga masyarakat. Dengan demikian akan memperkuat pula kesinambungan pembangunan dan stabilitas ekonomi.

Sidang Dewan yang terhormat;

Kita merasa lega, bahwa pertumbuhan ekonomi telah dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperluas pemerataan. Bersamaan dengan itu kita tetap menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka pengelolaan ekonomi makro.

Belakangan ini, bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi kita rasakan suhu perekonomian kita juga telah memanas. Hal itu tercermin dalam defisit transaksi berjalan pada neraca pembayaran dan laju inflasi. Dalam tahun kedua REPELITA VI ini defisit transaksi berjalan telah meningkat dari 3,5 miliar menjadi 6,9 miliar dolar Amerika. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya impor karena melonjaknya investasi yang memang kita dorong dan kita perlukan.

Pada tahun 1995/96 defisit transaksi berjalan tersebut adalah sekitar 3,3% dari PDB. Satu dua negara tetangga kita yang ekonominya juga tumbuh dengan cepat, mengalami defisit sekitar dua sampai dua setengah kali lipat rasio kita. Dilihat dari perbandingan ini, maka keadaan kita masih dalam batas aman. Namun, dibanding dengan sasaran REPELITA VI yang sebesar 2%, maka defisit kita sudah terlalu besar.

Laju inflasi juga tetap masih saja tinggi, di atas sasaran rata-rata REPELITA VI --yang sudah direvisi-- yaitu sekitar 6%. Pada tahun '94 laju inflasi kita mencapai 9,2%, meskipun pada tahun '95 telah turun sedikit menjadi 8,6%. Kita harus terus berusaha dengan sungguh-sungguh agar laju inflasi tidak melebihi sasaran REPELITA VI.

Kita berusaha terus untuk mendinginkan suhu perekonomian. Upaya itu ditempuh melalui berbagai kebijaksanaan terpadu di bidang moneter, di bidang fiskal maupun di sektor-sektor riil.

Dengan berbagai langkah yang telah dijalankan, kita harapkan agar mesin perekonomian kita menuju ke arah normal kembali. Kita memang harus senantiasa berhati-hati agar ekonomi kita yang terus tumbuh itu selalu dalam kondisi yang sehat.

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah pengendalian hutang luar negeri. Sejak semula kita memandang pinjaman luar negeri itu sebagai pelengkap dengan syarat yang selunak-lunaknya dan tidak memberatkan, mampu dipikul oleh kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh pinjaman tersebut serta tidak mengandung ikatan politik apapun.

Pinjaman luar negeri telah kita gunakan sebaik-baiknya dan sekarang telah banyak membuahkan hasil. Setahap demi setahap kita sedang bergerak ke arah kemandirian. Sementara itu kita telah mulai harus melunasi pinjaman-pinjaman yang kita lakukan di masa lalu. Jumlah pelunasan hutang itu akan makin besar setiap tahun karena akan makin banyak pula yang jatuh waktu.

Itulah sebabnya kita sedang giat menggali sumber-sumber dana dalam negeri untuk mempercepat pembayaran pinjaman dari yang telah dijadwalkan.

Dalam dua tahun pertama REPELITA VI telah empat kali kita mempercepat pembayaran pinjaman, yang meliputi jumlah sebesar hampir 1,5 miliar dolar Amerika atau hampir Rp.3,4 triliun. Jumlah tersebut berasal dari penjualan saham PT. Indosat, PT. Timah, dan PT. Telkom di pasar modal internasional. Di samping itu, dalam tahun anggaran 1996/97 ini kita telah mempercepat lagi pelunasan pinjaman sebesar 579 juta dolar Amerika atau hampir Rp.1,4 triliun. Dana pelunasan tersebut diperoleh dari sisa anggaran lebih. Kita berhasil menghimpun dana tersebut dari upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan penerimaan negara dan mempertajam pengeluaran negara.

Langkah-langkah mempercepat pembayaran pinjaman ini akan kita lanjutkan. Dana pengembalian itu terutama akan kita ambil dari hasil penjualan saham BUMN-BUMN yang sekarang

sedang dibenahi dan ditata kembali agar cukup memenuhi persyaratan untuk terjun di pasar modal di luar negeri.

Dengan demikian, beban pinjaman luar negeri bagi generasi yang akan datang akan makin berkurang, sedangkan upaya pembangunan yang kita lakukan sekarang merekalah yang akan paling menikmati.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Saya telah mengajak kita semua menelusuri kembali jalan yang kita tempuh di masa lampau hingga kita berada pada tahun ke-51 usia Republik Indonesia yang kita cintai ini, pada saat Orde Baru telah menempuh 30 tahun perjalanan sejarah.

Perjalanan bersama kita sebagai bangsa makin panjang. Jika kita tengok ke belakang, maka kita melihat kembali betapa kaya pengalaman yang diberikan oleh perjalanan itu kepada kita semua. Banyak rintangan yang menghadang. Tidak sedikit halangan yang kita hadapi. Kita kadang-kadang lengah karena perjalanan kita mulus. Kita kadang-kadang membuat kekeliruan.

Jika cita-cita Kemerdekaan kita ibarat berada di puncak gunung, maka perjalanan kita jelas telah mencapai dataran yang lebih tinggi dari awal kita berangkat. Dari ketinggian itulah kita bisa melihat kembali dengan jelas liku-liku jalan yang telah kita tempuh.

Sebagai bangsa kita berani belajar dari pengalaman perjalanan kita di masa lampau. Pengalaman adalah pelajaran yang paling berharga: baik kesulitan maupun keberhasilannya, baik suka maupun dukanya, baik kepedihan maupun kebahagiaannya. Kita belajar dari kekeliruan dan kegagalan, agar tidak kita ulangi lagi. Kita belajar dari keberhasilan untuk bekal perjalanan selanjutnya.

Melihat keberhasilan-keberhasilan yang kita raih, membuat kita berbesar hati dalam menatap masa depan. Melihat masalah-masalah yang belum berhasil kita tangani dan melihat kekeliruan

yang kita lakukan, membuat kita prihatin. Tetapi keprihatinan tidak cukup hanya dikatakan berulang-ulang. Keprihatinan kita jadikan semangat dan kekuatan untuk memperbaiki yang kita prihatinkan. Keprihatinan yang terus-menerus dapat membuat kita kecewa berkepanjangan, putus asa dan kehilangan akal. Sebagai bangsa kita dapat kehilangan rasa percaya diri. Ini sangat berbahaya, karena itu kita tidak akan kehilangan percaya diri.

Kita tidak akan kehilangan rasa percaya diri. Dengan ketekunan kita telah pemeratakan hasil-hasil pembangunan, sehingga kesejahteraan rakyat bertambah baik. Dengan bekerja keras kita telah mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan penuh kewaspadaan kita telah menjaga stabilitas nasional yang dinamis, baik stabilitas ekonomi maupun stabilitas politik.

Setelah berhenti sejenak melihat perjalanan yang telah lewat, marilah kita lanjutkan perjalanan panjang menuju terwujudnya masyarakat Pancasila, masyarakat maju yang makmur berkeadilan dan adil berkemakmuran.

Marilah kita bergandengan tangan lebih erat dan bahu-membahu untuk bekerja lebih tekun: antara semua lapisan, golongan, kalangan dan generasi bangsa kita.

Marilah kita saling mengingatkan jika ada yang lengah atau salah arah. Marilah kita saling memberi semangat jika ada yang letih. Marilah kita ulurkan tangan kepada yang masih tertinggal. Itulah semangat yang terpancar dari Pancasila.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua.

Terima kasih.

